Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora
https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/
Vol. 5, No. 4 Oktober 2026
P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499

IMPLEMENTASI PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH (GPM) OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU UNTUK MENJAGA STABILITAS HARGA PANGAN

Junia Putri Amril[1], Virna Museliza[2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email korespondensi vmuseliza66@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Affordable Food Movement (GPM) Program by the Pekanbaru City Food Security Agency in maintaining food price stability. This study employs a qualitative descriptive method. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The research analysis employs George C. Edward III's (1980) theory, which includes four indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the GPM has been supported by coordination among stakeholders, the dissemination of information, and the division of tasks among implementers. This program helps the community obtain food at more affordable prices. However, its implementation still faces challenges in the form of limited commodity stock, long lines of people, and the fact that activities are not yet conducted on a regular basis. Therefore, it is necessary to increase food availability and ensure the sustainable implementation of the program.
Keywords : Implementation, Affordable Food Initiative, Food Price Stability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menjaga stabilitas harga pangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori George C. Edward III (1980) dengan empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan GPM telah didukung oleh koordinasi antarpihak, penyampaian informasi, serta pembagian tugas pelaksana. Program ini membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga lebih terjangkau. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan stok komoditas, antrean masyarakat, serta frekuensi kegiatan yang belum rutin. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketersediaan pangan dan pelaksanaan program secara berkelanjutan.
Kata kunci : Implementasi, Gerakan Pangan Murah, Stabilitas Harga Pangan

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (Flora, 2025). Namun, dalam pelaksanaannya, harga pangan sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pasokan, kondisi cuaca, distribusi, serta meningkatnya permintaan masyarakat. Perubahan harga tersebut dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi(Ariandi, 2025) . Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah perkotaan memiliki kebutuhan pangan masyarakat yang terus berlangsung setiap harinya. Perubahan harga sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Berdasarkan portal Pantauan Harga Pangan Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pekanbaru, pemantauan harga pangan dilakukan melalui koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan di 13 pasar tradisional. Data tersebut mencakup berbagai komoditas pangan, seperti beras, cabai, bawang, minyak goreng, gula, daging, dan kebutuhan pangan lainnya. Pemantauan ini menunjukkan bahwa perubahan harga pangan perlu diperhatikan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pengendalian harga di daerah.

Berdasarkan data pemantauan harga pangan TPID Kota Pekanbaru pada 10 November 2026, terdapat beberapa komoditas pangan yang memiliki harga sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Table 1. Pemantauan Harga Pangan Pada 10 November 2026

Komoditas Pangan	Harga nya
Cabai Merah Keriting	Rp 91.923/kg
Cabai Merah Besar	Rp80.462/kg
Bawang Merah	Rp36.385/kg
Minyak Kita	Rp 16.075/Liter

Sumber: Portal Pantauan Harga Pangan Harian TPID Kota Pekanbaru

Data tersebut menunjukkan bahwa harga komoditas pangan di Kota Pekanbaru perlu terus dipantau. Pemantauan harga menjadi penting karena perubahan harga dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah, salah satunya melalui Program Gerakan Pangan Murah, untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat adalah melalui Program Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dengan menyediakan berbagai kebutuhan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar (Oktaviani, 2025) . Melalui pelaksanaan GPM, masyarakat diharapkan dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang relatif lebih murah, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga komoditas pangan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan dan distribusi pangan melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru (Darul, 2025).

Meskipun Program Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bahan pangan dengan harga yang lebih murah, tetapi juga bergantung pada proses implementasinya. Pelaksanaan program perlu didukung oleh penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta pembagian tugas dan prosedur birokrasi yang terarah. Apabila aspek-aspek tersebut belum berjalan secara optimal, pelaksanaan program dapat menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan (Marliani, 2025).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara awal di lapangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Namun, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penyampaian informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan, kondisi antrean masyarakat ketika kegiatan berlangsung, serta pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan secara rutin. Selain itu, selisih harga antara komoditas yang dijual dalam kegiatan GPM dengan harga di pasar juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana program memberikan manfaat bagi masyarakat (Ardi & Indarto, 2025).

Menganalisis pelaksanaan program tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana informasi program disampaikan kepada masyarakat, bagaimana ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan, bagaimana komitmen para pelaksana, serta bagaimana pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan program. Melalui teori tersebut, implementasi Program Gerakan Pangan Murah dapat dianalisis secara lebih terarah berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan (Firda, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menjaga stabilitas harga pangan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami proses pelaksanaan program berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah . Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, yang terdiri atas unsur Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, pelaksana program, dan masyarakat penerima manfaat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder(Hafizah et al., 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan serta pengamatan terhadap pelaksanaan program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan sumber tertulis yang berkaitan dengan Program Gerakan Pangan Murah dan stabilitas harga pangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program,

mulai dari penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, hingga pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan (Haifa et al., 2025).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah (GPM). Informan penelitian berjumlah orang, terdiri atas pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, pelaksana Program Gerakan Pangan Murah, dan masyarakat penerima manfaat program.

Table 2. Table Identitas Infoman

Informan	Jumlah
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	1
Bidang Distribusi Dinas Ketahana Pangan Kota Pekanbaru	1
Pelaksana Program GPM	2
Masyrakat Penerima Manfaat GPM	4

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan menguraikan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis implementasi Program Gerakan Pangan Murah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Program Gerakan Pangan Murah Oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Untuk Menjaga Stabilitas Harga Pangan

Program Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Di Kota Pekanbaru, program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan menyediakan berbagai komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meringankan pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru, penelitian ini

menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Program Gerakan Pangan Murah, komunikasi berkaitan dengan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat, termasuk informasi jadwal, lokasi, dan jenis bahan pangan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi mengenai kegiatan GPM dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media komunikasi, seperti WhatsApp dan perangkat RT/RW. Penyampaian informasi tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui pelaksanaan kegiatan dan dapat memanfaatkan program yang diselenggarakan.

Selain penyampaian informasi melalui WhatsApp dan perangkat RT/RW, komunikasi dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah juga berkaitan dengan bagaimana informasi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan menjadi hal yang penting karena masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat menyesuaikan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya penyampaian informasi yang baik, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan program dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Komunikasi juga diperlukan dalam membangun koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi tersebut membantu proses persiapan dan penyelenggaraan program, terutama dalam memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Penyampaian informasi yang jelas kepada seluruh pihak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui beberapa saluran informasi, tetapi juga perlu memperhatikan luasnya jangkauan informasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyebaran informasi yang lebih optimal agar masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi kegiatan secara lebih mudah.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah, sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta ketersediaan bahan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah didukung oleh ketersediaan bahan pangan pokok yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komoditas yang dijual dalam kegiatan ini meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, bawang, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Ketersediaan bahan pangan tersebut menjadi salah satu unsur penting agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Selain ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia juga berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Petugas yang terlibat bertanggung jawab dalam mempersiapkan kegiatan, mengatur proses penjualan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pada saat kegiatan berlangsung, jumlah masyarakat yang datang terkadang cukup ramai sehingga dapat menimbulkan antrean. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung masih perlu diperhatikan agar pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

Dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah, sumber daya memiliki peranan penting karena keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada kesiapan berbagai kebutuhan pendukung. Sumber daya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup tenaga pelaksana dan fasilitas yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Seluruh unsur tersebut saling berkaitan dalam mendukung kelancaran proses penyediaan dan penjualan bahan pangan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, dan bawang menjadi salah satu bentuk dukungan sumber daya dalam pelaksanaan GPM. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga penyediaannya dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan bahan pangan tersebut juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi perubahan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Selain itu, sumber daya manusia yang terlibat memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan dan mengatur jalannya kegiatan. Petugas berperan dalam membantu proses pelayanan, mengatur pembelian, serta memastikan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kesiapan petugas diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara tertib dan tidak mengalami kesulitan selama mengikuti kegiatan.

Meskipun demikian, pelaksanaan GPM masih menghadapi kondisi antrean ketika masyarakat datang dalam jumlah cukup banyak. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya perlu diimbangi dengan pengelolaan pelayanan yang baik. Pengaturan jumlah petugas, ketersediaan stok bahan pangan, serta fasilitas pendukung perlu diperhatikan agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia tidak hanya mendukung terlaksananya program, tetapi juga menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah, disposisi dapat dilihat dari keseriusan petugas dalam melaksanakan kegiatan serta sikap mereka ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, petugas yang terlibat dalam kegiatan GPM telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal tersebut terlihat dari pelayanan yang diberikan selama kegiatan berlangsung, mulai dari membantu masyarakat memperoleh bahan pangan hingga melayani proses pembelian. Sikap pelaksana yang baik menjadi salah satu faktor pendukung karena dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat penerima manfaat.

Disposisi merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah, disposisi dapat dilihat dari bagaimana petugas menjalankan tugasnya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap pelaksana menjadi bagian penting karena berhubungan langsung dengan pengalaman masyarakat ketika mengikuti kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, petugas yang terlibat dalam pelaksanaan GPM telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelaksana dalam menjalankan program yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Pelayanan yang

diberikan juga menjadi unsur penting dalam menciptakan kenyamanan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Komitmen pelaksana juga dapat dilihat melalui keterlibatan mereka dalam mempersiapkan kegiatan dan membantu proses penyaluran bahan pangan. Pelaksanaan program membutuhkan kesungguhan dari setiap petugas agar seluruh tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, maka proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan lebih baik.

Walaupun demikian, sikap pelayanan yang baik perlu didukung dengan kemampuan dalam menghadapi kondisi di lapangan. Ketika jumlah masyarakat yang datang cukup ramai dan terjadi antrean, petugas perlu tetap memperhatikan ketertiban serta kelancaran pelayanan. Dengan demikian, disposisi tidak hanya dilihat dari sikap ramah dan tanggung jawab petugas, tetapi juga dari kesungguhan mereka dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak selama program dilaksanakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, serta prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Program Gerakan Pangan Murah, struktur birokrasi diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan GPM melibatkan pihak Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan pihak-pihak terkait dalam penyediaan serta penyaluran bahan pangan. Koordinasi antar pihak diperlukan untuk mempersiapkan komoditas, menentukan pelaksanaan kegiatan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas dan koordinasi tersebut, pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah. Meskipun demikian, penyampaian informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara lebih jelas.

Struktur birokrasi merupakan indikator yang berkaitan dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan prosedur dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Program Gerakan Pangan Murah, struktur birokrasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami perannya masing-masing. Pembagian tugas yang jelas dapat membantu menghindari tumpang tindih pekerjaan serta mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan GPM melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru bersama pihak-pihak terkait dalam proses penyediaan dan penyaluran bahan pangan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut membutuhkan koordinasi agar setiap tahapan kegiatan dapat dipersiapkan dengan baik. Koordinasi diperlukan mulai dari persiapan komoditas hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Selain pembagian tugas, koordinasi juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari struktur birokrasi. Setiap pihak perlu saling berkomunikasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya koordinasi, proses pelaksanaan program diharapkan menjadi lebih terarah dan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, pelaksanaan program masih membutuhkan peningkatan dalam hal pengaturan dan penyampaian informasi kegiatan. Jadwal dan lokasi pelaksanaan perlu disampaikan secara lebih jelas agar masyarakat dapat mengetahui kapan dan di mana kegiatan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas di lingkungan pelaksana, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana prosedur pelaksanaan program dapat berjalan secara teratur dan mudah diakses oleh masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Gerakan Pangan Murah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan proses penyampaian informasi, ketersediaan bahan pangan, pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah antara lain adanya koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu, ketersediaan bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat turut mendukung pelaksanaan program. Harga bahan pangan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran juga menjadi alasan masyarakat memanfaatkan kegiatan GPM.

Dukungan lainnya terlihat dari sikap petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung. Penyampaian informasi melalui WhatsApp dan

perangkat RT/RW juga membantu masyarakat mengetahui pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berpartisipasi dalam program tersebut.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kondisi yang turut mendukung pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru. Faktor pendukung tersebut berkaitan dengan keterlibatan pihak pelaksana, ketersediaan bahan pangan, serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pertama, adanya koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi salah satu unsur pendukung dalam pelaksanaan program. Koordinasi tersebut membantu proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan sehingga setiap pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing. Kerja sama yang terjalin juga diperlukan untuk mendukung penyediaan bahan pangan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, tersedianya berbagai komoditas kebutuhan pokok menjadi faktor penting yang mendukung pelaksanaan GPM. Penyediaan bahan pangan seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, cabai, dan bawang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk manfaat program yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ketiga, adanya pelayanan dari petugas selama kegiatan berlangsung turut mendukung pelaksanaan program. Petugas yang membantu masyarakat dalam proses pembelian dapat memberikan kemudahan bagi penerima manfaat. Pelayanan yang baik juga dapat menciptakan suasana kegiatan yang lebih nyaman sehingga masyarakat dapat mengikuti program dengan lebih mudah.

Keempat, penyampaian informasi melalui WhatsApp dan perangkat RT/RW menjadi sarana pendukung dalam memperkenalkan kegiatan kepada masyarakat. Penggunaan saluran komunikasi tersebut membantu penyebaran informasi mengenai pelaksanaan GPM sehingga masyarakat yang menerima informasi dapat mengetahui dan mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang tersedia.

2. Faktor Penghambat

Sementara itu, faktor penghambat pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah berkaitan dengan penyampaian informasi jadwal kegiatan yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat secara merata. Pelaksanaan kegiatan yang tidak berlangsung secara rutin juga dapat menyebabkan masyarakat belum selalu mengetahui kapan program akan diselenggarakan.

Selain itu, tingginya antusiasme masyarakat pada saat kegiatan berlangsung terkadang menimbulkan antrean. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pelayanan, terutama apabila jumlah masyarakat yang datang cukup banyak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi, pengaturan antrean, serta koordinasi yang lebih baik agar pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah dapat berjalan secara optimal.

Di samping faktor pendukung, pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru juga masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut berkaitan dengan penyebaran informasi, keteraturan pelaksanaan kegiatan, serta kondisi pelayanan ketika masyarakat datang dalam jumlah yang cukup banyak.

Pertama, penyebaran informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat. Meskipun informasi telah disampaikan melalui WhatsApp dan perangkat RT/RW, masih terdapat kemungkinan masyarakat yang tidak memperoleh informasi tersebut. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat karena tidak semua warga mengetahui waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.

Kedua, pelaksanaan kegiatan yang belum berlangsung secara rutin menjadi salah satu kendala dalam memberikan kepastian kepada masyarakat. Ketika kegiatan tidak dilaksanakan secara teratur, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kapan program kembali diselenggarakan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan jadwal pelaksanaan perlu diperhatikan agar program dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Ketiga, tingginya antusiasme masyarakat ketika kegiatan berlangsung dapat menimbulkan antrean. Jumlah masyarakat yang datang secara bersamaan berpotensi membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan antrean dan pelayanan yang lebih tertib agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan lebih nyaman.

Keempat, ketersediaan stok bahan pangan juga perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas yang dijual dapat menyebabkan persediaan bahan pangan perlu dikelola dengan baik. Apabila jumlah stok tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang datang, maka tidak semua masyarakat dapat memperoleh komoditas yang diinginkan. Oleh karena itu, perencanaan jumlah bahan pangan perlu disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini berfokus pada implementasi Program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menjaga stabilitas harga pangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas dan konsisten agar dapat dipahami oleh pihak pelaksana maupun kelompok sasaran.

Dalam pelaksanaan Program GPM di Kota Pekanbaru, penyampaian informasi dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait serta penyebaran informasi kepada masyarakat melalui WhatsApp dan perangkat RT/RW. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilakukan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. Namun, penyampaian informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat diterima secara lebih merata. Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan GPM sudah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh masyarakat.

Pada Aspek Sumber Daya George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komunikasi, tetapi juga didukung oleh ketersediaan sumber daya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan GPM. Berbagai komoditas kebutuhan pokok disediakan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, petugas yang terlibat juga berperan dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, kondisi antrean ketika masyarakat datang secara bersamaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan masih perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya perlu didukung dengan pengaturan petugas dan fasilitas yang memadai agar kegiatan dapat berjalan lebih efektif.

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Pelaksana yang memiliki sikap positif dan tanggung jawab akan membantu tercapainya tujuan kebijakan.

Dalam pelaksanaan GPM di Kota Pekanbaru, sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek yang mendukung program. Pelayanan yang baik dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat ketika membeli bahan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program, karena pelaksanaan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan barang, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan.

Dalam Aspek struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas diperlukan agar setiap pelaksana memahami tanggung jawabnya dan kegiatan dapat berjalan secara terkoordinasi.

Dalam pelaksanaan Program GPM, keterlibatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan pihak terkait menunjukkan adanya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mendukung persiapan bahan pangan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Namun, penyampaian informasi jadwal kegiatan serta pengaturan pelaksanaan masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih terarah dan mudah diakses masyarakat.

Secara keseluruhan, implementasi Program Gerakan Pangan Murah di Kota Pekanbaru telah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Akan tetapi, pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan dalam aspek penyebaran informasi, pengelolaan sumber daya, pelayanan, dan koordinasi. Dengan demikian, pelaksanaan GPM diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta mendukung upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru telah dilaksanakan melalui empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan bahan

pangan, koordinasi pihak pelaksana, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa penyebaran informasi jadwal kegiatan yang belum merata, pelaksanaan yang belum rutin, dan antrean masyarakat pada saat kegiatan berlangsung.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi mengenai jadwal dan lokasi kegiatan GPM, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait, serta memperbaiki pengaturan antrean agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih tertib. Selain itu, pelaksanaan kegiatan perlu direncanakan secara lebih teratur sehingga manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.

REFERENCES

Ardi, M., & Indarto, K. (2025). Faktor Penghambat Program Gerakan Pangan Murah Oleh Dinas Ketahanan pangan Dan Pertanian Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Publik, 13(4), 1019–1029. https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id

Ariandi, H. (2025). Efektivitas Program Gerakan Pangan Murah di Kota Surakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 14(2), 1–11. https://doi.org/10.33061/jp.v14i2.12338

Darul, M. G. (2025). Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi dalam Perspektif Ekonomi Islam. JSE: Jurnal Sharia Economica, 4(2), 211–220. https://doi.org/10.46773/jse.v4i2.2286

Firda, S. (2025). Formulasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Penelitian. Jurnal Penelitian Nusantara, 1(6), 50–55. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.324

Flora. (2025). Pertanian Perkotaan, Solusi Inovatif untuk Ketahanan Pangan di Tengah Kota Marni. Jurnal Pertanian, 2(1), 189–195. https://doi.org/10.62951/flora.v2i1.265

Hafizah, Nasywa, Pebytabella, Cantika, T., Sari, & Mutiya. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 3(2), 586–593. https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025

Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Bahasa, 2(2), 257–267. https://doi.org/10.62383/dilan.v2i2.1563

Marliani. (2025). Paradigma Administrasi Publik Dalam Teori Dan Praktek. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 12(2), 542–549. https://doi.org/10.25157/dak.v12i2.20864

Oktaviani. (2025). Kenaikan Harga Barang Pokok Mempengaruhi Inflasi dan Stabilitas Politik: Studi Ekonomi Politik di Pasar Aur Duri Jambi. Journal of Economic Ecuation, 4(1), 80–87. https://doi.org/10.22437/jeec.v4i1.45270

Sugiyono. (2013). Metode Penulisan Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D. ALFABRTA,cv.